



Dugaan Penyimpangan Pembagian PHR

Mantan Kabiro Keuangan Pemprov Diperiksa Pekan Depan

Denpasar (Bali Post) -

Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali belum menemukan adanya perbuatan melawan hukum (PMH) atas perkara dugaan penyimpangan pembagian pajak hotel dan restoran (PHR) untuk enam kabupaten di Bali. Atas kondisi itu, pihak penyidik Kejati Bali terus mengembangkan penyelidikan. Walau sejumlah pejabat Pemprov Bali sudah diperiksa, namun itu masih terasa kurang sehingga sejumlah pejabat dan mantan pejabat di Pemprov Bali akan kembali diperiksa. Salah satunya, mantan Kabiro Keuangan Pemprov Bali, akan diperiksa pekan depan.

Hal itu dibenarkan Kasipenkum Humas Kejati Bali Ashari Kurniawan dan penyidik Made Tangkas. "Untuk namanya, nanti saya informasikan. Karena status mereka dipanggil dalam tahap penyelidikan," katanya. Dikatakannya, mereka akan dipanggil pekan depan. Sedangkan menurut Tangkas, pihaknya juga akan melakukan ekspose perkara setelah pemeriksaan saksi selesai.

Sebelumnya, sejumlah pejabat sudah diperiksa, termasuk dari pihak bank. Misalnya, Direktur Utama (Dirut) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali I Made Sudja, Kamis (2/7) lalu. Pemanggilan tersebut guna memastikan ada dana

mengendap di BPD Bali dari kiriman hasil PHR Badung dan Denpasar.

Salah satu Jaksa Penyidik Kejati Bali, Made Tangkas didampingi Kasipenkum dan Humas Ashari Kurniawan, usai pemanggilan Dirut BPD tersebut mengatakan, pemanggilan Dirut BPD Bali sangat penting karena berkenaan dengan dana bagi hasil PHR tersebut dikirim melalui Bank BPD Bali. Pihak penyidik, tentu tidak langsung meminta informasi bank soal itu, namun melalui permohonan pemilik rekening yakni Pengprov Bali sebagai pihak penerima hasil PHR tersebut dan membagikannya kepada enam kabupaten di Bali.

Ditambahkannya, informasi adanya selisih dan dana mengendap dalam rekening, terus dialami dan mulai terbuka. Dengan keterangan yang disampaikan pihak BPD, ada hal-hal yang mendasar yang dapat ditarik pihak penyidik. "Oleh karena itu, setelah diperiksa kami buat berita acaranya. Dengan demikian, data dan bahan keterangan yang didapat bisa kami jadikan kekuatan membuka dugaan atas kasus ini," pungkas Tangkas.

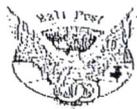
Sementara itu, jaksa penyidik Kejati Bali juga sudah merunut para sumber yang berkompoten untuk diminta keterangannya. Pejabat den-

gan peran kunci sudah memenuhi pemeriksaan, yakni Kadispenda Badung Wayan Adi Arnawa dan Kadispenda Kota Denpasar Dewa Nyoman Semadi. Demikian juga mantan Kadispenda Bali Wayan Suarjana, yang saat ini Sekwan DPRD Bali. Di tingkat kabag, juga telah diperiksa Kabag Keuangan Bangli dan Tabanan. Selain itu, juga Kabag Keuangan Klungkung Gusti Ngurah Putra. Belasan sumber telah diperiksa dalam tahapan penyelidikan ini.

Dugaan penyimpangan PHR ini, bermula dari kicauan anggota DPRD Badung, Nyoman Sentana. Menurut Sentana, pembagian PHR Badung yang diberikan ke enam kabupaten di Bali tidak sesuai dengan peruntukannya. Bagi-bagi PHR yang sebenarnya untuk mendukung pariwisata, ternyata malah digunakan keperluan lain. Pembagian yang diambil dari APBD Badung 2014 ini, karena tidak sesuai dengan peruntukannya, jelas merupakan penyimpangan. Hal itu juga tidak sesuai dengan surat kesepakatan bersama di luar perda, bahwa dana bagi hasil itu hanya untuk pariwisata.

Sementara mengenai jumlah nominal pembagian dana yang didapat dari PHR Badung tersebut, ada dugaan selisih dalam pelaporan dalam per-

tanggungjawaban di APBD Badung tahun 2014. Ditengarai, ada selisih dari nominal yang dilaporkan. (kmb37)



Gudang Farmasi Diskes Terbakar Kerugian Ditaksir Rp 3 Miliar



Bali Post/gik

SELAMATKAN DOKUMEN - Pegawai Dinas Kesehatan Karangasem berupaya menyelamatkan sejumlah dokumen penting, ketika terjadi kebakaran di gudang farmasi Dinas Kesehatan, Jumat (31/7) kemarin.

Edisi : Sabtu, 1 Agustus 2015
Hal : 13



Sambungan - -

Amlapura (Bali Post) -

Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Karangasem tiba-tiba dipenuhi kepulan asap, Jumat (31/7) kemarin. Rupanya, gudang farmasi Diskes ludes terbakar. Seluruh tumpukan obat di dalamnya tak bisa diselamatkan. Akibat kebakaran ini, persediaan obat di setiap puskesmas terancam. Total Diskes mengalami kerugian sekitar Rp 3 miliar.

Informasi yang dihimpun di lapangan, terbakarnya gudang Farmasi itu pertama diketahui Kasi Farmasi Diskes IGAK Rusmawati bersama stafnya Morist P. Mozes, pukul 15.30 wita. Saat itu, keduanya bersama lima staf lainnya, Gusti Agung Ayu Putri Candrawati, Ni Komang Sri Pratiwi, Wayan Rahmawati, Gusti Agung Ayu Trisnarini, dan Ni Nyoman Surati sedang lembur di gudang. Mereka terpaksa lembur, untuk mempersiapkan pemusnahan obat-obat kedaluwarsa. Rencananya dimusnahkan Selasa (4/8) nanti di Kecamatan Abang. "Saat sedang mempersiapkan itu, pak Morist melihat ada kepulan asap di salah satu tumpukan obat. Morist bersama Ibu Rusmawati histeris mendengar ledakan dan meminta tolong," terang salah satu staf lainnya, Wayan Rahmawati. Kepulan asap itu diduga muncul dari reaksi antar-obat di dalam gudang. Namun, muncul juga dugaan sumber api berasal dari korsleting listrik. Obat yang terbungkus dengan kardus, membuat api cepat melalap seluruh obat di dalam gudang. Seluruh staf di gudang farmasi sempat berusaha memadamkan api dengan air dan alat seadanya. Namun, api lebih cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi gudang.

Sehingga, mereka hanya bisa menyelamatkan sejumlah dokumen penting, peralatan elektronik seperti komputer dan printer, serta belasan tabung gas dan oksigen agar tidak terbakar.

Satu unit gudang farmasi itu, terdiri dari tiga ruangan. Ruangan paling parah terbakar di sisi utara tempat menyimpan obat jenis sirup, salep, injeksi, botol infus, hingga obat alkes. Di ruang tengah lokasi penyimpanan obat jenis tablet. Sementara, di ruang

selatan, sebagai ruang kerja staf gudang Farmasi Diskes.

Setelah tak berdaya menghadapi api yang mulai menghanguskan atap ruangan, salah satu staf kemudian menghubungi BPBD Karangasem dan diteruskan ke Pemadam Kebakaran (Damkar). Kepala BPBD Karangasem, Ida Ketut Arimbawa, langsung menerjunkan satu kendaraan tangki air dan tiga mobil pemadam kebakaran. Pihak Damkar juga langsung terjun ke lokasi dengan armada serupa. Api baru bisa dipadamkan pukul 17.30 wita. Setelah dicek di dalam

gudang itu, seluruh jenis obat-obatan ludes terbakar. Seperti jenis botol sirup, salep, injeksi, botol infuse, hingga obat alkes. Ada juga jenis tablet, tetes mata dan tetes telinga, yang masing-masing tersimpan di dalam ribuan tumpukan kardus.

Kebakaran ini mendapat perhatian sejumlah pejabat di Karangasem. Mereka antara lain, Penjabat Bupati Karangasem Ida Bagus Ngurah Arda, Sekda Gede Adnya Muliadi, Kepala Bappeda Ketut Sedana Merta, Kepala Dinas Perhubungan dan Damkar Wayan Sutarta, Kepala Satpol

PP Iwan Suparta, dan Kepala Dinas Kesehatan I Gusti Made Tirtayana. "Gudang farmasi ini, persediaan obat untuk 12 puskesmas di seluruh Karangasem. Obat dikirim setiap tiga bulan sekali," kata Kadiskes. Akibat kebakaran ini, persediaan obat di setiap puskesmas terancam. Total Diskes mengalami kerugian sekitar Rp 3 miliar.

Guna mengantisipasi, Penjabat Bupati Karangasem I Gusti Ngurah Arda ditemani Sekda Gede Adnya Muliadi, menginstruksikan Kadiskes untuk mengidentifikasi jenis obat yang paling sering dicari masyarakat. Dari anggaran pengadaan obat dalam APBD Induk tahun ini, sudah dianggarkan Rp 1,5 miliar. Sementara, Rp 200 juta di antaranya sudah dipakai pengadaan obat dan ikut terbakar di dalam gudang. Jika sudah diidentifikasi jenis obat itu, maka sisa anggaran Rp 1,3 miliar akan digunakan untuk melakukan pengadaan obat tersebut. Agar persediaan obat di setiap puskesmas tidak terganggu setidaknya dalam waktu enam bulan ke depan. Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Diskes Pemprov Bali, untuk membantu persediaan obat lain yang sangat dibutuhkan.

Sekda Adnya Muliadi menambahkan, pihaknya akan segera membicarakan masalah ini dengan Bagian Perlengkapan, untuk mencari lokasi baru sebagai tempat penyimpanan obat sementara. Ke depan, pihaknya merencanakan membangun gedung obat yang layak dan punya standar keamanan. "Gudang farmasi yang sekarang, tidak memenuhi standar keamanan. Obat disimpan bertumpuk-tumpuk seperti beras di toko," ujar Adnya Muliadi. (kmb31)



Kasus Perdin di Denpasar Kejari Temukan Kerugian Negara

Denpasar (Bali Post) -

Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar mengaku akan melakukan gelar perkara atau ekspos kasus dugaan korupsi perjalanan dinas (perdin) di Pemkot Denpasar, usai hari raya. Namun hingga kini, pihak Kejari Denpasar belum melakukan ekspos atas kasus perdin tersebut. Namun dipastikan bahwa perkara ini sudah naik ke tingkat penyidikan.

Pihak Kejari Denpasar, Jumat (31/7) kemarin sudah memastikan bahwa

kasus perdin ini sudah ada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan kerugian negara. "Tinggal ekspos. Kasus ini akan naik ke penyidikan," sebut salah seorang petugas kejaksaan.

Menurut informasi tadi, kasus dugaan korupsi Perdin Pemkot Denpasar sudah kelar hasil konsultasi dengan BPKP dan dipastikan ada kerugian negara dan ada perbuatan melawan hukum (PMH). Kasi Intel Kejari Denpasar, Syahrir Sagir, membenarkan memang kasus perdin sudah hampir kelar di

tingkat penyelidikan. Dia mengatakan, hasil konsultasi dengan BPKP sudah turun cukup lama. "Sudah cukup lama dapat hasil konsultasi dengan BPKP," ungkapnya.

Terkait indikasi kerugian negara dan PMH, dia memastikan sudah ada. "Kalau PMH sudah ada, sudah dipastikan ada PMH. Kemudian kerugian negara juga sudah, sudah dipastikan ada kerugian negara," jelasnya. Namun sayang, Syahrir enggan memberikan penjelasan detail terkait jumlahnya. (kmb37)

Edisi : Sabtu, 1 Agustus 2015

Hal : 3



Kolam Renang di Kubu Terbengkalai

Bangli (Bali Post) -

Keberadaan kolam renang di lingkungan Kelurahan Kubu, yang merupakan aset Pemkab Bangli hingga saat ini masih terbengkalai. Meski rencana pemanfaatannya sudah sempat dibahas saat rapat kerja (raker) antara Disdikpora dan dewan belum lama ini, namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda kolam renang tersebut akan segera dimanfaatkan.

Berdasarkan pantauan Jumat (31/7) kemarin, bangunan kolam renang yang berada tepat di belakang sekolah Pasraman Gurukula tersebut masih terlihat kumuh dan tak terurus. Rumput liar terlihat tumbuh meninggi di sekitar kolam. Bahkan pintu pagar yang selama ini digembok tersebut terlihat sudah mulai rusak dan jebol.

Beberapa warga yang ditemui di sekitar lokasi tersebut mengaku kolam renang yang cukup luas tersebut memang tidak pernah dimanfaatkan lagi. Terakhir, kolam tersebut dibuka untuk umum sekitar tahun 2013 lalu. Itu artinya pascarakor sekitar pertengahan tahun 2014 lalu, belum ada tindak lanjut dari Disdikpora untuk memanfaatkan bangunan kolam renang tersebut.

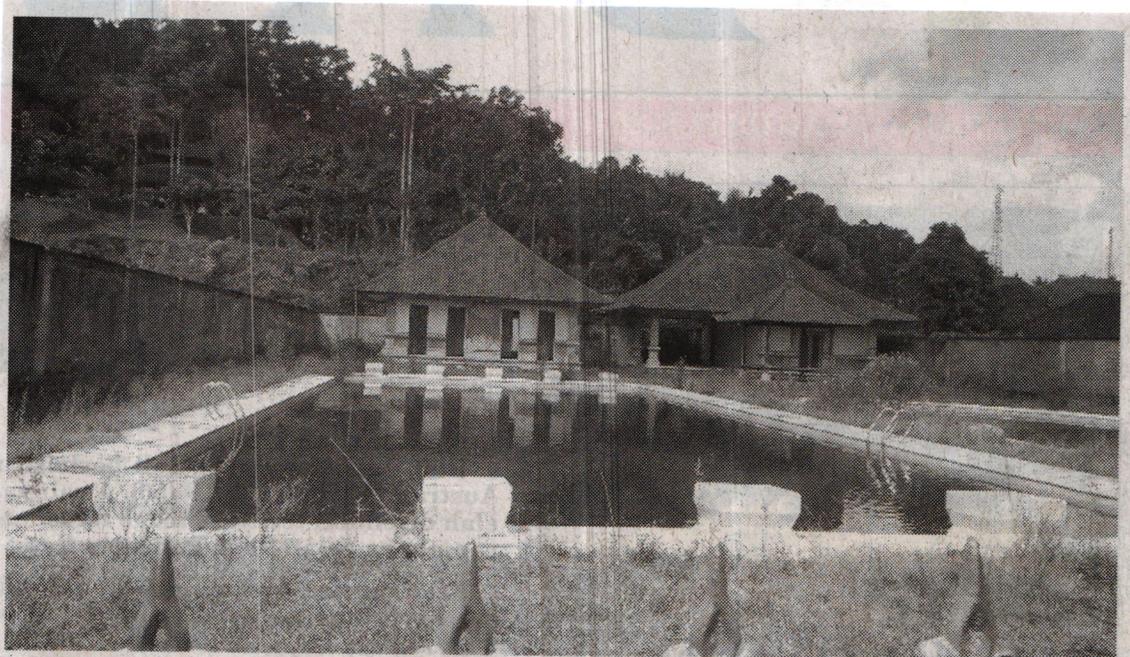
Terkait hal itu, Wakil Ketua DPRD Komang Carles men-

gatakan jika anggaran masih menjadi penyebab terkendalanya pemanfaatan kolam renang tersebut, maka pihaknya meminta Disdikpora untuk mengajukannya dalam APBD perubahan. Demikian juga soal regulasi, maka harus ditindaklanjuti dengan membuat regulasi. "Kalau kendalanya masih masalah regulasi ya harus ditindaklanjuti. Kalau masalahnya anggaran, saya minta agar bisa diajukan di perubahan," terangnya. Terlebih dalam waktu dekat ini akan dilakukan pembahasan KUA PPAS.

Menurut Carles, jika memang anggaran untuk pemanfaatan kolam renang tersebut tidak bisa dilakukan dalam perubahan tahun ini, maka pihaknya menyarankan untuk diajukan kembali pada tahun berikutnya. Yang terpenting bagaimana agar kolam renang



Sambungan - - -



Bali Post/ina

TERBENGKALAI - Kolam renang Pemkab Bangli di Kelurahan Kubu yang kini terbengkalai.

yang dibangun dengan dana APBN tersebut bisa segera bermanfaat bagi masyarakat. "Paling tidak bagaimana caranya agar aset itu tidak nganggur terus menerus. Kalau memang tidak bisa dikelola sendiri ya dikerjasamakan dengan pihak

ke tiga," jelasnya.

Sebagaimana yang diberitakan selama ini, kolam renang yang pengelolaannya ada di tangan Disdikpora Bangli itu awalnya merupakan bagian dari sarana dan prasarana TK/SD internasional terda-

hulu yang kini telah berubah menjadi SD 4 Kubu. Sebelum diserahkan ke Pemkab Bangli, keberadaan kolam tersebut hanya dimanfaatkan oleh SD 4 Kubu. Namun demikian pemanfaatannya hanya sebentar. (kmb40)

Edisi : Sabtu, 1 Agustus 2015

Hal : 8



Ranperda APBD Perubahan 2015 Denpasar Disahkan

Alokasi Anggaran Tetap Perhatikan Kepentingan Masyarakat

SIDANG Paripurna ke-10 Masa Periode II Tahun 2015 yang mengagendakan pemandangan umum dan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Denpasar yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede, Jumat (31/7) kemarin, akhirnya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015. Sidang yang sudah berlangsung dari pukul 10.00 Wita ini, dihadiri Wali Kota I.B. Rai Dharmawijaya Mantra, Wakil Wali Kota (Wawali) I G.N. Jaya Negara, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Denpasar, Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara dan pimpinan SKPD Pemkot Denpasar.

Agenda sidang terakhir kepemimpinan Wali Kota I.B. Rai Dharmawijaya Mantra bersama Wawali Jaya Negara yang tinggal menghitung hari memimpin Kota Denpasar, tetap berkomitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Juga, memperhatikan kemampuan daerah serta pos-pos anggaran tetap difokuskan untuk kepentingan masyarakat. Dalam pandangan umumnya, semua fraksi mengucapkan terima kasih atas kerja keras, inovasi dan kepemimpinan Wali Kota Rai Mantra dan Wawali Jaya Negara yang telah memberikan berbagai pencapaian dan prestasi yang telah diraih Pemkot Denpasar hingga tahun 2015.

Pemandangan umum diawali Fraksi Hanura yang dibacakan I.B. Ketut Kiana. Disebutkan, dari sisi belanja langsung dan belanja tidak langsung, direncanakan Rp 2,02 triliun lebih, meningkat Rp 262,20 miliar lebih dibandingkan anggaran induk Rp 1,76 triliun lebih. Pandangan Partai Gerindra yang dibacakan I Wayan Narsa menyebutkan, postur APBD Perubahan terinci pada bantuan keuangan terhadap desa untuk memenuhi amanat UU No. 6 Tahun 2014. "Kami mendorong Pemkot Denpasar untuk terus memperhatikan SDM desa dengan melakukan pelatihan-



DISAHKAN - Anggota fraksi DPRD Kota Denpasar menyerahkan hasil pandangan umum fraksi kepada pimpinan sidang I Gusti Ngurah Gede dan Wali Kota Rai Mantra bersama Wawali Jaya Negara dan selanjutnya disahkan menjadi Perda Kota Denpasar.

pelatihan terhadap aparat desa tentang pertanggungjawaban keuangan desa sehingga aparat desa tidak tersandung kasus hukum," katanya.

Partai Golkar melalui I Wayan Sugiarta mengatakan dapat menerima dan memahami Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015. Sementara Fraksi Demokrat melalui A.A. Alit Putra mengatakan, kenaikan anggaran belanja bantuan keuangan desa/kelurahan Rp 76,06 miliar lebih diharapkan dapat digunakan secara cermat dan sesuai dengan rambu-rambu aturan yang telah ditetapkan. Sementara Fraksi PDI Perjuangan melalui A.A. Putu Gede Wibawa mengatakan,

terjadi peningkatan pendapatan pada APBD Perubahan Tahun 2015 yakni Rp 73 miliar lebih dari APBD Induk Tahun 2015 dengan komposisi Pendapatan Asli Daerah sudah lebih besar dari dana perimbangan. Hal ini menunjukkan kemampuan Pemkot Kota Denpasar melakukan terobosan-terobosan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah sangat baik dengan tetap memperhatikan kemampuan dan kepentingan masyarakat.

Wali Kota Rai Mantra mengucapkan terima kasih kepada anggota dan pimpinan DPRD Kota Denpasar yang telah

dapat menetapkan Ranperda APBD Perubahan menjadi perda dengan proses tahapan telah berjalan baik. Rai Mantra bersama Jaya Negara juga mohon maaf dan berharap nantinya pembangunan Denpasar dapat berjalan lebih baik. (ad1758)



Warga Tanah Ampo Merasa Dibohongi Janji Sertifikat Tanah Gratis Belum Terealisasi

Amlapura (Bali Post) -

Warga pemilik tanah di Desa Pakraman Tanah Ampo, Manggis, Karangasem, merasa dibohongi. Masalahnya, Bupati Karangasem I Wayan Geredeg dulu menjanjikan tanah sisa pembebasan untuk jalan sepanjang 1,2 km dan lebar 12 meter ke pelabuhan *cruise* bakal dibantu sertifikat gratis. Namun sampai

Bupati Geredeg selesai menjabat, janji itu belum terealisasi.

Hal itu disampaikan beberapa pemilik tanah yang sebagian lahannya dibebaskan Pemkab Karangasem untuk pembukaan jalan ke pelabuhan kapal pesiar yang terancam mangkrak itu, Jumat (31/7) kemarin di Manggis. Sementara Bendesa Pakraman Tanah Ampo, I Gede Suy-

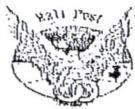


Bali Post/bud

BELUM BEROPERASI - Pelabuhan Cruise Tanah Ampo, Karangasem yang dikhawatirkan mangkrak. Dibangun tujuh tahun lalu, sampai kini belum beroperasi.

Edisi : Sabtu, 1 Agustus 2015

Hal : 13



Sambungan - - -

adnya, membenarkan pemilik lahan yang tanahnya sebagian dibebaskan untuk jalan resah. Soalnya, sertifikat yang dijanjikan dulu belum kelar. Padahal, pembebasan jalan itu sudah tujuh tahun lalu yakni pada 2008.

Suyadnya mengatakan, dirinya selaku bendesa, kerap ditanyai warganya soal sertifikat tanah yang dijanjikan pihak Pemkab Karangasem. "Saya menjadi tak enak. Tiap ketemu di jalan, warga pemilik tanah itu selalu menanyai saya mana dan kapan sertifikat baru tanah mereka diberikan," katanya.

Warga khawatir, kalau sertifikat tanah mereka nanti bakal hilang. Suyadnya sempat menanyakan sudah sejauh mana proses pengurusan sertifikat itu, dan di mana kini sertifikat asli milik warga. Suyadnya mengaku mendapatkan informasi dari pihak Kecamatan Manggis maupun petugas yang membicarakan bahwa 23 buah sertifikat warga sebagian masih tersimpan di kantor Camat Manggis dan sebagian lagi dipegang pihak Dinas PU Karangasem. "Untuk

proses sertifikat yang baru itu, sertifikat aslinya mesti disetor," kata Suyadnya.

Dia mengatakan, keresahan warga selain khawatir sertifikat asli tanah hilang, juga karena pejabat baik di Kecamatan Manggis atau di Dinas PU kerap berganti. Kadis PU kini sudah yang ketiga, setelah pada zamannya Ir. Wayan Arnawa. Warga juga sudah tujuh tahun tanahnya dibebaskan untuk jalan dihotmix. Tetapi warga pemilik tanah masih tetap membayar PBB sesuai luas tanah yang dulu. Padahal, ada warga yang tanahnya tinggal dua are, karena sudah dibebaskan menjadi jalan lingkar ke dermaga kapal pesiar itu. "Saya memiliki lahan 8 hektar dan 8 are dibebaskan untuk jalan lingkar itu. Ada juga tanah warga lainnya hampir habis, dan tinggal 8 are, pemiliknya tetap membayar pajak seperti sebelum tanahnya dipakai jalan," katanya.

Selain alasan tersebut, petugas Dinas PU yang dulu mengurus pembebasan lahan untuk jalan itu, Pak Kerta juga sudah

lama meninggal. Informasinya, kata Suyadnya, usai mengurus dan membayarkan ganti rugi tanah warga itu, Pak Kerta meninggal. "Warga kami khawatir sertifikat asli mereka hilang atau tak jelas," ujar Suyadnya.

Dikatakan, tahun 2008 uang pengganti tanah yang dibebaskan Rp 8 juta per are. Namun kini tanah di bagian tengah harganya sudah Rp 200 juta per are. "Saya dengar tanah di pinggir jalan itu, kini harganya berkisar Rp 300 juta per are," katanya.

Sementara Kabag Humas dan Protokol Setdakab Karangasem Made Supartha saat dikonfirmasi soal tuntutan warga minta sertifikat gratis sebagaimana dijanjikan Bupati Karangasem mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Camat Manggis maupun Kadis PU Karangasem Ir. Nyoman Sutirtayasa. Disampaikan, sertifikat baru untuk 23 buah sertifikat itu, masih dalam proses. Diakui prosesnya lama, karena banyak hal yang harus dilengkapi, misalnya surat pelepasan hak dari pemilik tanah. (013)